



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Diplomasi DPR RI di sidang AIPA
Tanggal : Jumat, 27 September 2013
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

Diplomasi DPR RI di Sidang AIPA

Indonesia kembali mengikuti Sidang Umum AIPA ke-34 yang diadakan di Brunei Darussalam, tanggal 17-23 September 2013. Sidang Umum AIPA ini sebagai salah satu upaya untuk memperkuat *Second-Track Diplomacy* Indonesia di tingkat regional, serta sebagai bentuk kontribusi DPR RI untuk mempererat kerja samaregional.

Acara yang dikemas untuk menjalin kerja sama ini mengambil tema "The Role of AIPA in Realizing ASEAN Community" dan dihadiri oleh 10 (sepuluh) Perwakilan Parlemen Anggota AIPA, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam, serta sejumlah Delegasi dari Parlemen negara-negara peninjau (*observer countries*), termasuk diantaranya Belarus, Kanada, China, Parlemen Eropa, India, Jepang, dan Federasi Rusia.

Sebagai tuan rumah, Parlemen Brunei Darussalam juga turut mengundang Perwakilan Sekjen ASEAN, Wakil Sekjen IPU, perwakilan dari ASEAN-WEN (*Wildlife Enforcement Network*), dan *Special Adviser for UN on the prevention of Genocide*.

Sidang Umum AIPA ke 34 dihadiri pula oleh sejumlah Ketua Parlemen dari negara-negara anggota dan *observer*, termasuk Ketua Parlemen Singapura, Laos, dan Timor Leste. Sementara itu, Delegasi DPR RI juga dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Dr. Marzuki Alie. Anggota delegasi yang turut berpartisipasi dalam Sidang Umum AIPA ke 34, antara lain Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam), Surahman Hidayat selaku Ketua BKSA DPR RI,

Andi Anzhar Cakra Wijaya, Atte Sugandi, Ida Ria Simamora, Muhammad Oheo Sinapoy, Selina Gita, Nazarudin Kiemas, Vanda Sarundajang, Okky Asokawati, Iskan Qolba Lubis, dan Marwan Ja'far. Delegasi DPR RI mengusung misi khusus, yaitu memastikan bahwa Sidang Umum AIPA kali ini dapat menghasilkan resolusi-resolusi yang implementatif dan soltif dalam menghadapi tantangan dari upaya untuk mewujudkan ASEAN Community 2015.

Dalam pidato sambutannya selaku Ketua Delegasi Indonesia, Ketua DPR RI Dr. H. Marzuki Alie menyampaikan pentingnya dukungan semua pihak untuk menyuskeskan pembentukan Komunitas ASEAN 2015 yang berlandaskan pada nilai-nilai perdamaian, saling menghargai, persaudaraan, dan kerja sama. Secara khusus, Ketua DPR menyampaikan dukungan kepada Parlemen Timor Leste untuk menjadi salah satu *observer* AIPA, yang tentunya akan memperkaya upaya kerjasama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Delegasi DPR RI mengajukan dua draft resolusi berjudul "Promoting the Role of AIPA in Response to the Challenges of ASEAN Economic Community and Supporting Green Growth" dan "The Role of AIPA in Advancing the Post 2015 Development Agenda". DPR RI menganggap kedua agenda tersebut sebagai isu krusial khususnya dalam menghadapi rencana pembentukan Komunitas ASEAN yang akan berlangsung kurang dari 1,5 tahun lagi. Delegasi Indonesia menyoroti kesenjangan pembangunan antar negara ASEAN

yang dapat menyebabkan ketimpangan dalam mekanisme integrasi regional. Perlu ada aksi agresif untuk meningkatkan daya saing ASEAN di tingkat internasional yang secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Isu lainnya yang ditekankan oleh Delegasi DPR RI adalah mengenai komitmen pembangunan pasca 2015 yang berlandaskan pada target pencapaian MDGs. Indonesia adalah salah satu negara yang konsisten dalam mengupayakan pencapaian MDGs. Namun perlu kita sadari bahwa seiring dengan dinamika sistem internasional, maka tantangan untuk menuju pembangunan berkelanjutan juga semakin kompleks. Delegasi DPR RI menyuarakan agar Parlemen Anggota AIPA menyadari pentingnya kerjasama yang lebih erat untuk melanjutkan komitmen pembangunan pasca 2015, di antaranya dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance*. Melalui Sidang Executive Committee, Ketua DPR RI secara aktif dan konsisten terus mengupayakan agar tuan rumah dapat mengakomodasi usulan Indonesia hingga akhirnya kedua agenda tersebut dapat didiskusikan dan disetujui dalam Sidang Pleno kedua yang diselenggarakan pada tanggal 22 September 2013.

Ketua DPR juga telah menyampaikan perihal Pertemuan SEAPAC (*Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption*) yang akan diadakan di

Medan pada bulan Oktober mendatang serta mengharapkan partisipasi para anggota parlemen di Kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai tuan rumah terus berupaya untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan melalui kerja sama regional untuk mencegah dan memerangi korupsi. DPR RI berharap bahwa berbagai inisiatif parlemen yang disalurkan melalui mekanisme *Second-Track Diplomacy* dapat dipahami sebagai salah satu upaya penting dalam menyuarakan kepentingan masyarakat Indonesia.

Sementara itu dalam sidang komisi politik, anggota Delegasi Indonesia, Muhammad Oheo Sinapoy aktif mengkritisi isu-isu keamanan yang dibahas selama berlangsungnya pertemuan. Secara khusus, Delegasi DPR RI mengajukan usulan agar draft resolusi yang berjudul "Supporting the ASEAN Political Security Community" juga mengakomodasi mengenai tantangan bidang politik keamanan yang semakin kompleks, baik yang bersifat tradisional maupun nontradisional.

[***/syarif wibowo/Info]